

14/90

(60)

Hukum

LAPORAN PENELITIAN KELOMPOK

Kontrak No. 073 / PP.UA/OP_7/1990

**KONTRIBUSI SEKTOR PERPAJAKAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH SUMATERA BARAT**

Team Peneliti :

Pembimbing : Darmilis, S.H.M.H

Anggota : Yuslim, S.H, M.H

Ahmad Rusli S.H

Darnis, S.H

Immasni Amin.SH

Ilhamdi Taufik.S.H



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS

JALAN PERUMIS KEMERDEKAAN 77 PADANG TILP. 21316

PADANG

1990

P E N D A H U L U A N

1. Masalah Penelitian.

Pembangunan nasional jangka panjang secara bertahap-tahap dalam lima tahunan dilaksanakan di daerah-daerah, baik yang bersifat sektoral maupun regional. Ini berarti bahwa Pelita Daerah adalah merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional yang dilaksanakan di daerah, yang saling menunjang dan melengkapi satu sama lainnya dalam mewujudkan pembangunan Negara secara keseluruhannya.

Bahwa pembangunan nasional dan pembangunan daerah dilaksanakan berkesinambungan secara bertahap dalam jangka panjang yang dalam jangka menengahnya meliputi tahap lima tahunan. Dan setiap tahap pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat serta meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya. Dalam rangka pembangunan nasional jangka panjang itu maka strategi pembangunan daerah Sumatera Barat adalah sesuai dan konsisten dengan strategi pembangunan nasional. Dalam hal ini titik berat pembangunan jangka panjangnya adalah pembangunan bidang ekonomi, sedangkan pembangunan dalam bidang-bidang lainnya bersifat saling melengkapi dan saling menunjang dengan pembangunan bidang ekonomi tersebut.

Sebagaimana diketahui kebijaksanaan pembangunan di daerah - yang dilaksanakan secara bertahap bertumpu pada dan bertujuan untuk mencapai Trilogi Pembangunan yaitu : Pemerataan Pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan Stabilitas yang sehat dan dinamis. Ketiga unsur Trilogi Pembangunan itu saling berkae

tan dan saling memperkuat/mendukung satu sama lainnya. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa pembangunan daerah adalah bagian integral serta saling menunjang dan melengkapi dengan pembangunan Nasional. Dengan demikian tujuan dan sasaran pembangunan daerah adalah sesuai dan konsisten dengan - yang dari tingkat nasional, yaitu Trilogi Pembangunan. Hanya - saja bagi daerah Sumatera Barat berlandaskan tujuan dasar dan utama tersebut, dikembangkan selanjutnya tujuan dan sasaran - yang merupakan kelengkapannya.

Kesemua tujuan dan sasaran pembangunan daerah Sumatera Barat itu disebut sebagai Sapta Karya Pembangunan Daerah. Adapun sapta karya Pembangunan Daerah itu meliputi tujuh unsur tujuan yang sasaran pembangunannya sebagai berikut :

1. Terlaksananya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju tercapainya keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.
2. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, terutama di daerah pedesaan.
3. Terpeliharanya stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis di daerah.
4. Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka pembinaan moral dan akhlak.
5. "akin majunya kecerdasan rakyat.
6. Terbinanya keharmonisan tata kehidupan menurut alur dan patut.
7. Meningkatnya partisipasi Ninik Mamak, alim ulama, cerdik pandai, wanita, generasi muda dan seluruh lapisan masyarakat di-

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari data yang dikumpulkan mengenai Pajak Daerah sejak tahun anggaran 1985/86 sampai dengan tahun anggaran 1989/90 dapat digambarkan sebagai berikut :

<u>Tahun anggaran 1985/86</u>	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Pajak Rumah Tangga Dasar I/II	55.000.000.-	43.491.461.-
Pajak Kendaraan Bermotor	3.130.330.000.-	3.267.809.088.-
Bea Balik Nama (BBNKB)	3.159.200.000.-	2.528.416.160.-
Pajak Izin Menangkap ikan	7.000.000.-	7.291.000.-
<u>Penerimaan lain-lain pajak</u>	PM	30.050.-
J u m l a h	6.351.530.000.-	5.847.037.759.-

Pada tahun anggaran 1985/86 ini kelihatan oleh kita bahwa target yang dapat dicapai ternyata rendah dari rencana semula hanya sebesar 92,057 %. Pos penerimaan pajak yang sangat jauh dari target adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang semula ditargetkan sebesar Rp 3.159.200.000 hanya dapat direalisasikan sebesar Rp 2.528.416.160.-

Dapat kita berikan perbandingan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan dengan perbandingan sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp 8.359.714.500.- yang dapat direalisasikan pada tahun tersebut sebesar Rp 7.837.578.532,19 dengan demikian kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah saat ini adalah perbandingan jumlah Pajak Daerah yang direalisasikan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah yakni sebesar 94,60 %.

Dengan jumlah 94,60 % dirasakan cukup besar sumbangan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan.

Kesimpulan dan Saran-saran

Setelah mengamati perkembangan pendapatan Pajak Daerah melalui beberapa tahun anggaran yakni sejak tahun anggaran 1985/86 sampai dengan tahun anggaran tahun 1989/90 dapat diberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Pemungutan Pajak Daerah sudah dilaksanakan sesuai dengan azas legalitas perpajakan, dalam arti kata Pajak Daerah dikenakan kepada masyarakat berdasarkan peraturan perundangang yang berlaku.
2. Sumbangan sektor Pajak Daerah terhadap pemasukan rutin daerah merupakan sektor yang paling banyak, begitu juga jika dibandingkan dengan semua jenis pemasukan dalam lingkungan Pendapatan Asli Daerah.
3. Pajak Daerah merupakan pos penerimaan yang potensial bagi daerah Tk I Sumatera Barat dewasa ini, dan diperkirakan pemasukan dari sektor tersebut akan mengalami kenaikan setiap tahun anggaran.
4. Dari jenis-jenis Pajak Daerah yang ada sekarang ini maka sektor Pajak Izin Menangkap ikan merupakan pajak yang masih kecil memasukkan income terhadap Pajak daerah, sebaliknya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama selalu meningkat dan merupakan pos penerimaan yang sangat diandalkan.
5. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Sumatera Barat selalu menggali pendapatan asli daerah, dalam arti - kata menggiatkan usaha-usaha lain yang mempunyai kaitan erat dengan itu.